

ANALISIS SOSIAL BUDAYA REDD+ 2011

Penyusunan Kriteria Indikator Pemilihan Lokasi dan Strategi Keberhasilan Implementasi REDD dari Perspektif Struktur Sosial Budaya

Tim Peneliti PUSPIJAK



Pusat Penelitian Perubahan Iklim dan
Kebijakan

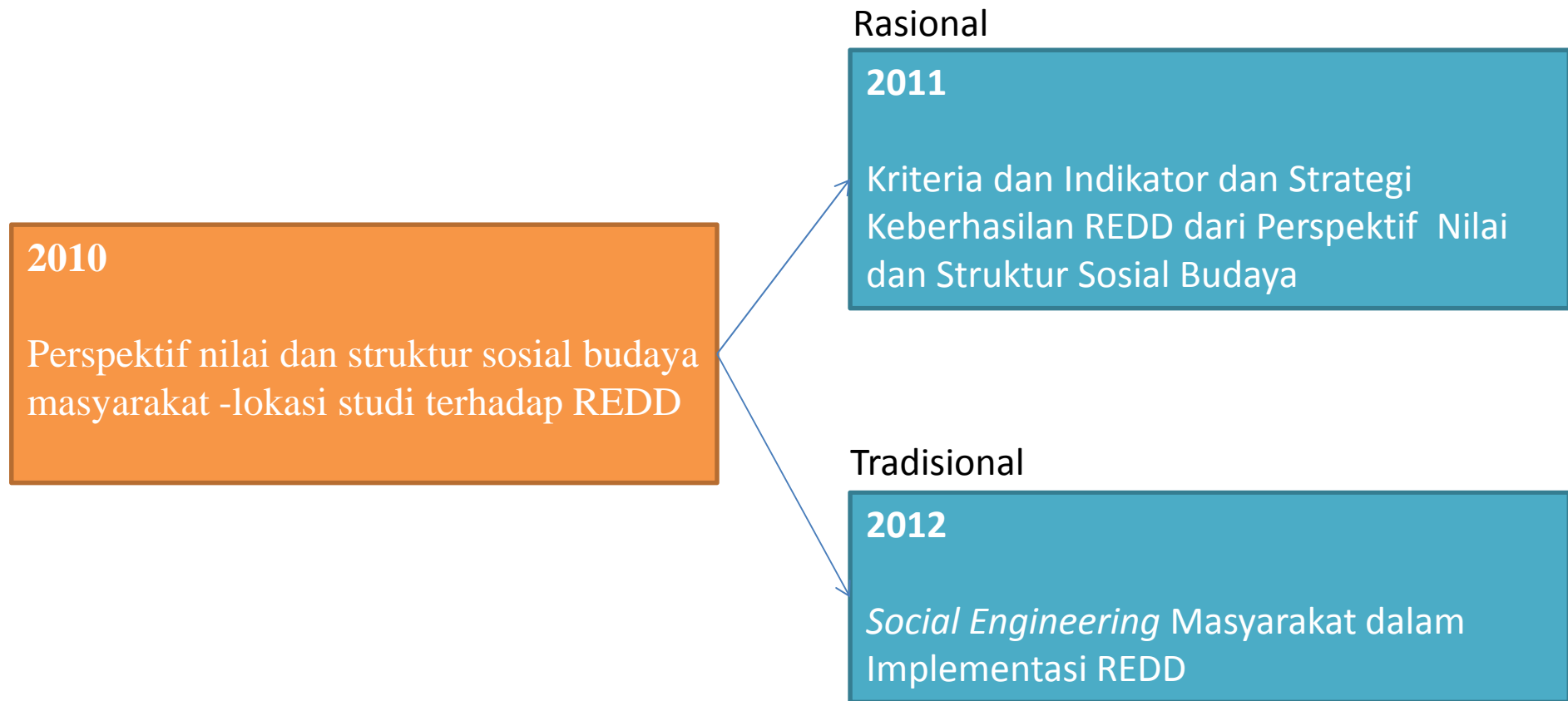
19.420 desa = +/- 2 juta orang berada di dalam
atau sekitar hutan menjadi tantangan tersendiri
implementasi REDD

Kendala Implementasi dan Implikasi Implementasi



Kerangka Penelitian

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan 2010 – 2012



Tujuan Penelitian

Umum :

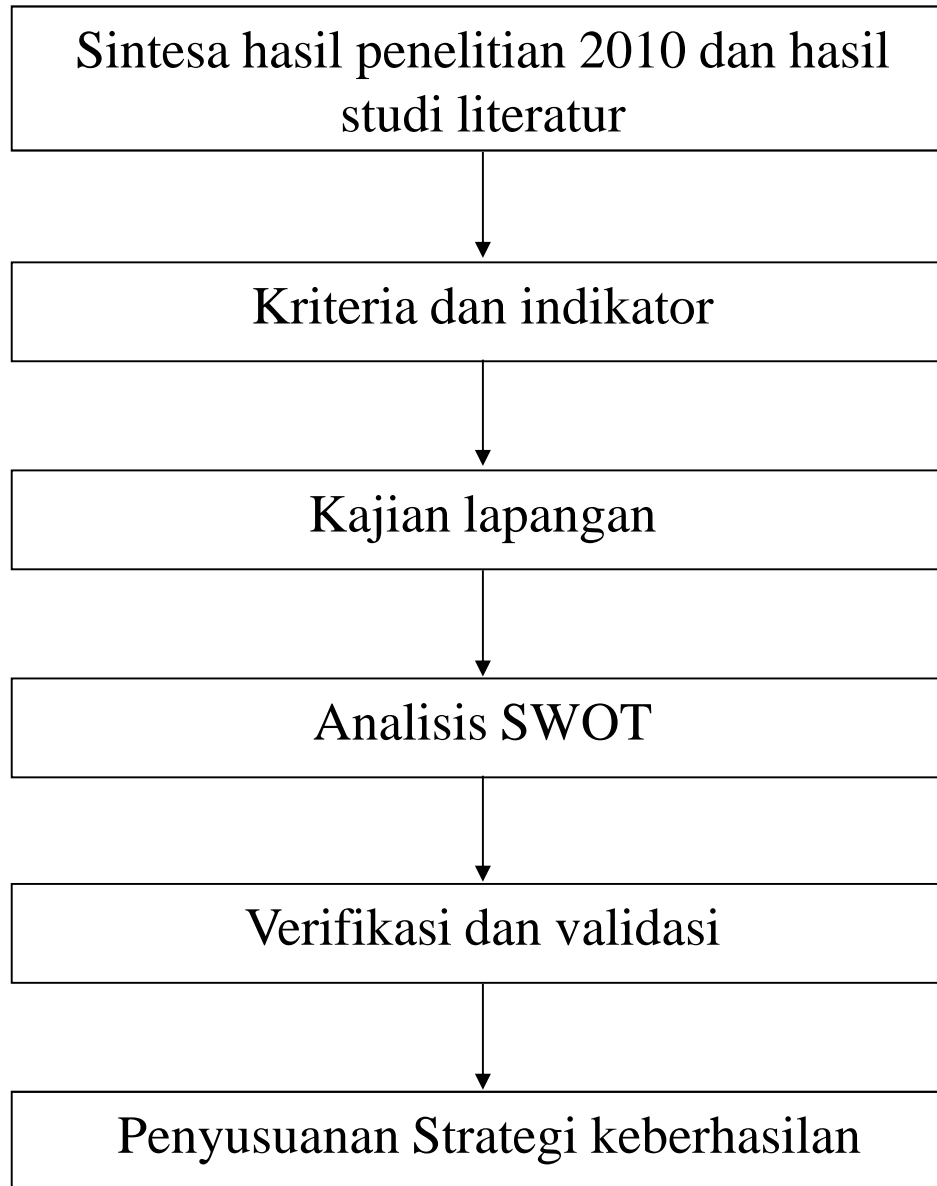
menganalisis struktur sosial budaya masyarakat untuk menyusun pengetahuan, dan rekomendasi kebijakan untuk keberhasilan REDD+

Khusus :

- Merumuskan kriteria dan indikator keberhasilan REDD+
- Merumuskan strategi keberhasilan REDD+



Kerangka Pikir Penelitian



Lokasi Penelitian:

- Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- Taman Nasional Meru Betiri, Provinsi Jawa Timur
- Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat



Keberhasilan implementasi REDD+ memerlukan dukungan empat aspek, yakni aspek tata kelola (*governance*), aspek biofisik hutan, aspek sosial ekonomi dan budaya, serta aspek data dan sistem MRV.

Aspek tersebut digunakan dalam penentuan kriteria dan indikator untuk pemilihan Provinsi Pilot (percontohan) REDD+ terkait LoI Norwegia-Indonesia

Penelitian ini mengadopsi perspektif sosial budaya untuk pemilihan Provinsi Pilot



K & I Sintesa hasil penelitian 2010 dan hasil studi literatur

Kriteria		Indikator	
1.	Nilai Ekonomi Sumberdaya Hutan	a.	Hutan memiliki kandungan karbon tinggi
		b.	Potensi investasi di sektor kehutanan dan non-kehutanan namun terkait hutan tinggi
		c.	Adanya mata rantai ekonomi yang tinggi
		d.	Sektor kehutanan berkontribusi tinggi pada PDRB
2.	Ketergantungan Masyarakat terhadap Hutan	a.	Sebagian masyarakat sekitar hutan memiliki mata pencaharian terkait hutan
		b.	Keterlibatan parapihak dalam pengelolaan hutan
		c.	Kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat
		d.	Hutan memiliki nilai budaya/adat
3.	Kapasitas Masyarakat	a.	Organisasi/institusi pengelola hutan yang mandiri
		b.	Masyarakat memiliki kapasitas kelembagaan dan organisasi yang baik
4.	Potensi Konflik Sumberdaya Hutan	a.	Terdapat potensi konflik dalam batas yang bisa dikelola
		b.	Memiliki mekanisme resolusi konflik yang baik
5.	Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (di dalam dan sekitar hutan)	a.	Ketersediaan perangkat hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan
		b.	Kapasitas aparat pem dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat
		c.	Terdapat mekanisme yang terpercaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan disetujui masyarakat

Analisis Data

- Kriteria dan indikator yang diperoleh dari sintesa hasil penelitian 2010 dan studi literatur dan dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perspektif sosial budaya masyarakat yang dianalisis menggunakan SWOT
- Melakukan perbandingan antara faktor eksternal (peluang dan ancaman) dengan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang dimiliki oleh suatu institusi
- Hasil analisis tersebut diambil keputusan strategi keberhasilan REDD+ yang memaksimalkan kekuatan dan peluang dengan meminimalkan kelemahan dan ancaman dari perspektif sosial budaya masyarakat



Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Program REDD+ Berau:

1. Program Karbon Hutan Berau (PKHB)

- Penyusunan Rencana Pelibatan Masyarakat
- Penjangkauan dan Konsultasi Masyarakat :
 - hulu Sungai Kelay (Desember 2010)
 - Hutan Lindung Sungai Lesan (Februari 2011)
 - hulu Sungai Segah (Maret 2011)

2. *Forest and Climate Change Programme (ForClime)*

- IUPHHK PT. Inhutani 1 Labanan
- IUPHHK PT. Sumalindo Lestari Jaya IV (PT. SLJ IV)
- “Inception”



Hasil dan Pembahasan

Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di TNMB

- Sejak tahun 1999 terlibat dengan masyarakat sekitar hutan, TNMB setidaknya sudah cukup berpengalaman dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat.
- Kegiatan-kegiatan pengelolaan TNMB yang melibatkan masyarakat yang telah dilakukan setidaknya dapat dijadikan bekal yang cukup ketika di masa yang akan datang REDD akan implementasikan.



Skoring Kriteria dan Indikator Masyarakat di Kabupaten Berau

No.	Item	Poin	Nilai
1.	Kriteria: Nilai ekonomi sumberdaya hutan		
	Indikator:		
	a. Hutan memiliki kandungan karbon tinggi	5	Sangat tinggi
	b. Potensi investasi di sektor kehutanan dan non-kehutanan namun terkait hutan tinggi	4	Tinggi
	c. Adanya mata rantai ekonomi yang tinggi	4	Tinggi
2.	Kriteria: Ketergantungan masyarakat terhadap hutan		
	Indikator:		
	a. Sebagian masyarakat sekitar hutan memiliki mata pencaharian terkait hutan	4	Tinggi
	b. Keterlibatan parapihak dalam pengelolaan hutan	4	Tinggi
	c. Kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat	4	Tinggi
3.	Kriteria: Kapasitas masyarakat		
	Indikator:		
	a. Organisasi/institusi pengelola hutan yang mandiri	3	Sedang
	b. Masyarakat memiliki kapasitas kelembagaan dan organisasi yang baik	3	Sedang
	4.	Kriteria: Potensi konflik terhadap sumberdaya hutan	
Indikator:			
a. Terdapat potensi konflik dalam batas yang bisa dikelola		4	Tinggi
b. Memiliki mekanisme resolusi konflik yang baik		3	Sedang
5.		Kriteria: Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat (di dalam dan sekitar hutan)	
	Indikator:		
	a. Ketersediaan perangkat hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan	2	Rendah
	b. Kapasitas aparat pemda dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat	3	Sedang
	c. Terdapat mekanisme yang terpercaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan disetujui masyarakat	3	Sedang

Strategi Keberhasilan Implementasi REDD+ Kabupaten Berau

	<p style="text-align: center;">Kekuatan (strength, S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian masyarakat sekitar hutan memiliki mata pencaharian terkait hutan 2. Hutan memiliki nilai budaya/adat 3. Masyarakat memiliki kapasitas kelembagaan dan organisasi yang baik 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (weaknesses, W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi/institusi pengelola hutan yang mandiri 2. Memiliki mekanisme resolusi konflik yang baik 3. Ketersediaan perangkat hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan 4. Kapasitas aparat pemda dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat
<p style="text-align: center;">Peluang (opportunities, O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hutan memiliki kandungan karbon tinggi 2. Potensi investasi di sektor kehutanan dan non-kehutanan namun terkait hutan tinggi 3. Adanya mata rantai ekonomi yang tinggi 4. Sektor kehutanan berkontribusi tinggi pada PDRB 5. Keterlibatan parapihak dalam pengelolaan hutan 6. Kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat 7. Terdapat mekanisme yang terpercaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan disetujui masyarakat 	<p style="text-align: center;">Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menarik investasi di sektor kehutanan dan yang terkait dengan kehutanan yang menambah alternatif mata pencaharian masyarakat dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah 2. Bersikap terbuka dan melibatkan para pihak terutama masyarakat dalam berbagai upaya pemanfaatan hutan melalui kelembagaan yang ada 	<p style="text-align: center;">Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas institusi pengelola hutan sehingga dapat memanfaatkan potensi karbon dari hutan dan berbagai potensi investasi lain yang memiliki mata rantai ekonomi yang tinggi 2. Menciptakan mekanisme resolusi konflik dengan melibatkan parapihak 3. Meningkatkan kapasitas aparat pemda sehingga mampu meningkatkan kepedulian pemda dan masyarakat dan membangun mekanisme yang terpercaya guna melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan
<p style="text-align: center;">Ancaman (threats, T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat potensi konflik dalam batas yang bisa dikelola 	<p style="text-align: center;">Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara budaya masyarakat yang baik dalam mengelola hutan sehingga terjaga kelestarian mata pencahariannya 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat sehingga mampu mengelola konflik dengan baik 	<p style="text-align: center;">Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penguatan kapasitas pemda agar hak masyarakat adat diakui dan dilindungi melalui lembaga pengelola hutan yang mandiri 2. Melakukan management konflik sehingga terhindar dari konflik yang kritis dan berkepanjangan

Skoring Kriteria dan Indikator Masyarakat di TNMB

No.	Item	Poin	Nilai
1.	Kriteria: Nilai ekonomi sumberdaya hutan		
	Indikator:		
	a. Hutan memiliki kandungan karbon tinggi	5	Sangat tinggi
	b. Potensi investasi di sektor kehutanan dan non-kehutanan namun terkait hutan tinggi	4	Tinggi
	c. Adanya mata rantai ekonomi yang tinggi	4	Tinggi
2.	Kriteria: Ketergantungan masyarakat terhadap hutan		
	Indikator:		
	a. Sebagian masyarakat sekitar hutan memiliki mata pencaharian terkait hutan	4	Tinggi
	b. Keterlibatan parapihak dalam pengelolaan hutan	3	Sedang
	c. Kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat	3	Sedang
3.	Kriteria: Kapasitas masyarakat		
	Indikator:		
	a. Organisasi/institusi pengelola hutan yang mandiri	2	Rendah
	b. Masyarakat memiliki kapasitas kelembagaan dan organisasi yang baik	3	Sedang
	4.	Kriteria: Potensi konflik terhadap sumberdaya hutan	
Indikator:			
a. Terdapat potensi konflik dalam batas yang bisa dikelola		2	Rendah
b. Memiliki mekanisme resolusi konflik yang baik		3	Sedang
5.		Kriteria: Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat (di dalam dan sekitar hutan)	
	Indikator:		
	a. Ketersediaan perangkat hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan	2	Rendah
	b. Kapasitas aparat pemda dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat	2	Rendah
	c. Terdapat mekanisme yang terpercaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan disetujui masyarakat	2	Rendah

Strategi Keberhasilan Implementasi REDD+ di TNMB

	<p style="text-align: center;">Kekuatan (strength, S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Hutan memiliki kandungan karbon tinggi 2.Keterlibatan parapihak dalam pengelolaan hutan 3.Kepedulian pemerintah daerah dan masyarakat 4.Hutan memiliki nilai budaya/adat 5.Organisasi/institusi pengelola hutan yang mandiri 6.Masyarakat memiliki kapasitas kelembagaan dan organisasi yang baik 7.Memiliki mekanisme resolusi konflik yang baik 8.Kapasitas aparat pemda dalam mengakui dan melindungi hak masyarakat 	<p style="text-align: center;">Kelemahan (weaknesses, W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian masyarakat sekitar hutan memiliki mata pencaharian terkait hutan 2. Terdapat potensi konflik dalam batas yang bisa dikelola 3. Ketersediaan perangkat hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan 4. Terdapat mekanisme yang terpercaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan disetujui masyarakat
<p style="text-align: center;">Peluang (opportunities, O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Potensi investasi di sektor kehutanan dan non-kehutanan namun terkait hutan tinggi 2.Adanya mata rantai ekonomi yang tinggi 3.Sektor kehutanan berkontribusi tinggi pada PDRB 	<p style="text-align: center;">Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasarkan potensi karbon yang tinggi untuk menarik investor sehingga meningkatkan keterlibatan parapihak dalam pengelolaan hutan. 2. Meningkatkan kerjasama dengan LSM atau instansi lain sebagai motivator masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM serta melakukan pendampingan kepada masyarakat secara intensif 3. Mendorong kinerja berbagai organisasi masyarakat yang sudah ada agar bisa menjadi mitra kerjasama bagi investor baik di sektor kehutanan maupun non kehutanan yang memiliki mata rantai ekonomi yang tinggi. 	<p style="text-align: center;">Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Meningkatkan kerjasama dan koordinasi serta sinkronisasi program dan kegiatan oleh parapihak agar tercipta kelestarian sumberdaya hutan dan kesejahteraan masyarakat 2.Mengurangi ketegantungan masyarakat terhadap hutan dengan menarik investor sehingga dapat menciptakan alternatif mata pencaharian. 3.Selalu membuka dialog dengan masyarakat untuk memastikan kegiatan disetujui masyarakat dan meminimalkan potensi konflik 4.Mengupayakan aturan formal dan jaminan hukum atas keterlibatan masyarakat dalam mengelola lahan rehabilitasi untuk menggairahkan investasi
<p style="text-align: center;">Ancaman (threats, T)</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">Strategi S-T</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">Strategi W-T</p> <p style="text-align: center;">-</p>

Hasil dan Pembahasan

Lokasi Kabupaten Sumedang → penelitian awal

Hasil:

- Masyarakat umumnya bermata pencaharian sebagai petani sehingga mempengaruhi penggunaan lahan yang sebagian besar untuk pertanian dengan rata-rata luas yang diolah tiap petani adalah 0,7 ha. Namun, kegiatan budidaya tidak dapat dilakukan maksimal karena ketiadaan sumber air.
- Ketergantungan terhadap hutan relatif rendah karena tidak banyak lagi yang menggunakan kayu bakar. Hasil budidaya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan harian berusaha ditutupi dengan mengusahakan ternak.



Hasil dan Pembahasan

- Tingkat kebersamaan yang tinggi, keaktifan bergotong-royong dan mengikuti kegiatan keagamaan dan menjadikan tokoh agama dan pemuka desa sebagai panutan (paternalistik).
- Kegiatan Proyek Penanaman untuk *Carbon Sink* dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun dengan melibatkan masyarakat sebagai petani penggarap pada lahan yang disewa oleh seorang tokoh agama dan pendampingan dari LSM. Sistem agroforestri dipilih untuk memberi kesempatan petani memanfaatkan lahan di bawah tegakan selain memelihara tanaman pokok. Penentuan jenis tanaman pokok dilakukan melalui diskusi.



Terima Kasih



Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan